

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA BIAK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
**Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Biak**  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama : Drs. H. A. Razak Pellu, SH, MH**  
**Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura**  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

**Pihak pertama** pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Wakil Ketua PTA Jayapura

Ttd

**Drs. H. A. Razak Pellu, SH, MH**  
NIP. 19550401 198603 1 004

Biak, 9 Januari 2018  
Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Agama Biak,



**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

### PENGADILAN AGAMA BIAK

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	
		d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu	
		e. Persentase minutasasi berkas perkara secara tepat waktu	
2	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus	
		b. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	
3	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum : - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan kembali	
4	Terwujudnya sistem informasi perkara untuk menunjang kinerja peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase informasi perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP	
5	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	
7	Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan penataan administrasi kepegawaian yang baik	
8	Terwujudnya kinerja SDM pegawai	a. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisai hasil pelatihan / diklat	
		b. Persentase peningkatan kinerja pegawai melalui penilaian SKP dan penilaian prestasi kerja	
		c. Persentase peningkatan penyelenggaraan DDTK	
9	Meningkatnya transparansi pengelolaan belanja layanan perkantoran (operasional) dan non operasional	a. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja pegawai dan operasional	
		b. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja non operasional	
10	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja	Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja modal	
11	Terwujudnya pola kearsipan yang dinamis	Persentase peningkatan pengarsipan tata persuratan	

12	Terwujudnya pengelolaan perpustakaan yang tertib	Persentase peningkatan tata kelola perpustakaan	
13	Terwujudnya sistem informasi melalui website	Persentase peningkatan sistem informasi melalui website	
14	Terselenggaranya pelayanan kinerja baik dalam bentuk aplikasi dan laporan	Persentase penyelesaian laporan tahunan, laporan SIRUP dan LKJIP	

**Kegiatan :**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. | : Rp. 3.161.135.000,- |
| 2. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.               | : Rp. 146.000.000,-   |
| 3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama                                      | : Rp. 50.000.000,-    |

**Jumlah**

**Rp.3.357.135.000,-**

Wakil Ketua PTA Jayapura

Ttd

**Drs. H. A. Razak Pellu, SH, MH**  
NIP. 19550401 198603 1 004

Biak, 09 Januari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Biak,



**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001